



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/411/KT.03/2021
Lampiran : 1 (satu) set
Sifat : Biasa
Hal : Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian SPBE Tahun 2021 Susulan

24 Juni 2021

Yth. Tim Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Terlampir
di
Tempat.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan memberikan jadwal susulan terhadap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang belum memenuhi penilaian mandiri pada tahap pertama sebagaimana terlampir. Adapun kegiatan evaluasi SPBE dimaksud dilaksanakan secara serempak untuk seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membentuk data dasar (*baseline*) baru penilaian SPBE berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Demi kelancaran pelaksanaan evaluasi dimaksud, Tim Asesor Internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat memaksimalkan pelaksanaan sesuai dengan tahapan kegiatan evaluasi SPBE pada waktu susulan yang tersedia. Adapun mekanisme kegiatan akan dilakukan secara daring (*online*) sesuai jadwal terlampir, melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penilaian mandiri;
2. Penilaian interviu; dan
3. Penilaian visitasi (apabila diperlukan).

Sehubungan dengan mekanisme tersebut, Tim Asesor Internal dapat menunjuk 2 (dua) orang selaku perwakilan/narahubung setiap instansinya dan menyampaikan melalui aplikasi (<https://konfirmasi.menpan.go.id>) paling lambat tanggal 28 Juni 2021. Sebagai informasi, lebih dari 400 K/L/Pemda telah melaksanakan Evaluasi SPBE Tahun 2021 pada tahap pertama. Besar harapan kami, penilaian dari instansi Saudara dapat segera kami terima untuk dilakukan tahapan penilaian eksternal.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami mengucapkan terima kasih.

**ASISTEN DEPUTI
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN
KOORDINASI PENERAPAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**



CAHYONO TRI BIROWO

Tembusan Yth.:
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian PANRB

Lampiran I.

Nomor: B/411/KT.03/2021

Tanggal: 24 Juni 2021

TIM ASESOR INTERNAL SPBE INSTANSI PUSAT

1. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
2. Kementerian Dalam Negeri
3. Kementerian Sosial
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Kementerian Perindustrian
6. Kejaksaan Agung
7. Lembaga Ketahanan Nasional RI
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
10. Televisi Republik Indonesia
11. Komisi Kejaksaan
12. Komisi Aparatur Sipil Negara
13. Badan Amil Zakat Nasional
14. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
15. Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi
16. Komite Akreditasi Nasional
17. Lembaga Sensor Film
18. Konsil Kedokteran Indonesia

Lampiran I.

Nomor: B/411/KT.03/2021

Tanggal: 24 Juni 2021

TIM ASESOR INTERNAL SPBE PEMERINTAH DAERAH

1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara
2. Pemerintah Provinsi Papua
3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
4. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
5. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
6. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar
7. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya
8. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
9. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah
10. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara
11. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
12. Pemerintah Kabupaten Asmat
13. Pemerintah Kabupaten Banggai
14. Pemerintah Kabupaten Banggai Laut
15. Pemerintah Kabupaten Bengkalis
16. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
17. Pemerintah Kabupaten Berau
18. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor
19. Pemerintah Kabupaten Bima
20. Pemerintah Kabupaten Bireuen
21. Pemerintah Kabupaten Boalemo
22. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
23. Pemerintah Kabupaten Bombana
24. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango
25. Pemerintah Kabupaten Boven Digoel
26. Pemerintah Kabupaten Bulungan
27. Pemerintah Kabupaten Buru
28. Pemerintah Kabupaten Buru Selatan
29. Pemerintah Kabupaten Buton
30. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah
31. Pemerintah Kabupaten Deiyai
32. Pemerintah Kabupaten Dogiyai
33. Pemerintah Kabupaten Dompu
34. Pemerintah Kabupaten Donggala
35. Pemerintah Kabupaten Ende
36. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak
37. Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
38. Pemerintah Kabupaten Gorontalo
39. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara
40. Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
41. Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
42. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

43. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
44. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
45. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
46. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
47. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
48. Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
49. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
50. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
51. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya
52. Pemerintah Kabupaten Jayapura
53. Pemerintah Kabupaten Kaimana
54. Pemerintah Kabupaten Kapuas
55. Pemerintah Kabupaten Karimun
56. Pemerintah Kabupaten Kaur
57. Pemerintah Kabupaten Kep. Mentawai
58. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru
59. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
60. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula
61. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar
62. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
63. Pemerintah Kabupaten Kerinci
64. Pemerintah Kabupaten Ketapang
65. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
66. Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
67. Pemerintah Kabupaten Konawe
68. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
69. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan
70. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
71. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
72. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
73. Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
74. Pemerintah Kabupaten Landak
75. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya
76. Pemerintah Kabupaten Lembata
77. Pemerintah Kabupaten Lingga
78. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
79. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
80. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara
81. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu
82. Pemerintah Kabupaten Malaka
83. Pemerintah Kabupaten Malinau
84. Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya
85. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
86. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
87. Pemerintah Kabupaten Mamasa
88. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya
89. Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah
90. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
91. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur
92. Pemerintah Kabupaten Mappi
93. Pemerintah Kabupaten Maybrat

94. Pemerintah Kabupaten Melawi
95. Pemerintah Kabupaten Merauke
96. Pemerintah Kabupaten Mesuji
97. Pemerintah Kabupaten Mimika
98. Pemerintah Kabupaten Minahasa
99. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan
100. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara
101. Pemerintah Kabupaten Morowali Utara
102. Pemerintah Kabupaten Mukomuko
103. Pemerintah Kabupaten Muna
104. Pemerintah Kabupaten Muna Barat
105. Pemerintah Kabupaten Murung Raya
106. Pemerintah Kabupaten Nabire
107. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
108. Pemerintah Kabupaten Nduga
109. Pemerintah Kabupaten Ngada
110. Pemerintah Kabupaten Nias
111. Pemerintah Kabupaten Nias Barat
112. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
113. Pemerintah Kabupaten Nias Utara
114. Pemerintah Kabupaten Nunukan
115. Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
116. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
117. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Sel.
118. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
119. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
120. Pemerintah Kabupaten Paniai
121. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
122. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
123. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak
124. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang
125. Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
126. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat
127. Pemerintah Kabupaten Pidie
128. Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
129. Pemerintah Kabupaten Pohuwato
130. Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
131. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu
132. Pemerintah Kabupaten Puncak
133. Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya
134. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
135. Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
136. Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
137. Pemerintah Kabupaten Sambas
138. Pemerintah Kabupaten Sarmi
139. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
140. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
141. Pemerintah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
142. Pemerintah Kabupaten Simalungun
143. Pemerintah Kabupaten Sintang
144. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

145. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan
146. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah
147. Pemerintah Kabupaten Supiori
148. Pemerintah Kabupaten Tabalong
149. Pemerintah Kabupaten Takalar
150. Pemerintah Kabupaten Tambrauw
151. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
152. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
153. Pemerintah Kabupaten Tapin
154. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni
155. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama
156. Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una
157. Pemerintah Kabupaten Tolikara
158. Pemerintah Kabupaten Tolitoli
159. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara
160. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
161. Pemerintah Kabupaten Wakatobi
162. Pemerintah Kabupaten Waropen
163. Pemerintah Kabupaten Way Kanan
164. Pemerintah Kabupaten Yahukimo
165. Pemerintah Kabupaten Yalimo
166. Pemerintah Kota Bandar Lampung
167. Pemerintah Kota Baubau
168. Pemerintah Kota Bima
169. Pemerintah Kota Binjai
170. Pemerintah Kota Kupang
171. Pemerintah Kota Lhokseumawe
172. Pemerintah Kota Makassar
173. Pemerintah Kota Metro
174. Pemerintah Kota Sabang
175. Pemerintah Kota Subulussalam
176. Pemerintah Kota Tangerang Selatan
177. Pemerintah Kota Tarakan
178. Pemerintah Kota Ternate
179. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan
180. Pemerintah Kota Tual

Lampiran II.

Nomor: B/411/KT.03/2021

Tanggal: 24 Juni 2021

A. Jadwal Rencana Pelaksanaan Evaluasi SPBE Tahun 2021

| No | Kegiatan | Jadwal Pelaksanaan |
|----|---------------------------|-------------------------------|
| 1. | Penilaian Mandiri Susulan | 25 Juni – 7 Juli 2021 |
| 2. | Penilaian Interviu | 20 Juli – 23 Agustus 2021 |
| 3. | Penilaian Visitasi | 23 September – 1 Oktober 2021 |

Catatan:

- 1) *Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan evaluasi SPBE dapat diakses melalui menu Bantuan Aplikasi Evaluasi SPBE (<https://monev.spbe.go.id/>). Username dan Password diberikan setelah mengisi konfirmasi.*
- 2) *Masing-masing perwakilan yang menjadi PIC Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengisi data diri pada tautan berikut <https://konfirmasi.menpan.go.id/event/239>*
- 3) *Tautan Video Recap dan Bahan Sosialisasi Evaluasi SPBE Tahun 2021 akan kami sampaikan melalui perwakilan masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.*
- 4) *Untuk informasi lebih lanjut, Perwakilan K/L/Pemda dapat menghubungi Tim Teknis Evaluasi SPBE pada Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE di nomor:*
 - a. *Nugroho Arief (0822-4919-0828) untuk Perwakilan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota di seluruh Indonesia*
 - b. *Joshua Ariel (0856-5101-5615) untuk Perwakilan Pemerintah Kabupaten di Jawa, Kalimantan, Papua dan Papua Barat*
 - c. *Muthia Nur Rachmayanti (0857-7310-1473) untuk Perwakilan Pemerintah Kabupaten di Sulawesi, Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Maluku Utara*
 - d. *Eka Bella Kirana (0895-3602-81347) untuk Perwakilan Pemerintah Kabupaten di Sumatera*